

IMPLEMENTASI KONSEP TRIPLE NEXUS DALAM UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN (*PEACEBUILDING*) SETELAH KONFLIK AMBON

IMPLEMENTATION OF THE TRIPLE NEXUS CONCEPT IN *PEACEBUILDING* AFTER THE AMBON CONFLICT

Anju Nofarof Hasudungan

Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rupat Riau, Indonesia
 anjunofarof@gmail.com

Artikel diterima 24 April 2021, diseleksi 25 Mei 2021, dan disetujui 28 Juli 2021
 DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.469>

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Triple Nexus concept (Humanitarian, Development, Peace) carried out by the United Nations Development Program (UNDP) together with national and local institutions in Maluku. Such as Convey Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, and the Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon in the peacebuilding process in Ambon-Maluku. This research was conducted using descriptive qualitative research methods. Data was collected through literature study, document analysis, observation, and interviews in January 2018 and July to October 2019. The results showed that the implementation of the Triple Nexus concept in peacebuilding efforts in Ambon-Maluku was very effective and efficient. This can be seen from the refutation of the thesis that the reconciliation process will take decades. The establishment of Ambon-Maluku as a peace laboratory and the most tolerant city after the Ambon conflict is an antithesis. The challenge in the future is the strengthening of identity politics and populism in gaining power that can disrupt peacebuilding.

Keywords: *Triple Nexus, Peacebuilding, Ambon Conflict, Local Wisdom, Pela Gandong*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi konsep *Triple Nexus (Humanitarian, Development, Peace)* yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* bersama lembaga nasional dan lokal Maluku. Seperti *Convey Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) IAIN Ambon* dalam proses membangun perdamaian (*peacebuilding*) di Ambon-Maluku. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, observasi, dan wawancara pada Januari 2018 dan Juli hingga Oktober 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep *Triple Nexus* dalam upaya membangun perdamaian (*peacebuilding*) di Ambon-Maluku sangat efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibantahnya tesis bahwa proses rekonsiliasi akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Ditetapkannya Ambon-Maluku sebagai laboratorium perdamaian dan kota paling toleransi pasca Konflik Ambon adalah sebuah antitesis. Tantangan kedepannya adalah menguatnya politik identitas dan populisme dalam meraih kekuasaan yang dapat mengganggu proses *peacebuilding*.

Kata Kunci: *Triple Nexus, Peacebuilding, Konflik Ambon, Kearifan Lokal, Pela Gandong*

PENDAHULUAN

Perdamaian bukanlah tujuan melainkan kondisi yang terus menerus diusahakan dan diperjuangkan, sebuah proses tiada akhir. Seperti halnya perdamaian di Ambon-Maluku yang masih terus dibangun pasca konflik Ambon. Perdamaian saat ini bersifat laten (semu) bukan perdamaian sejati (true peace). Karena menurut Jack Manuputty masih terdapat 40 % hingga 50 % potensi untuk kembali terjadinya konflik (Nurdin, 2018). Potensi konflik yang ada diantaranya karena masih adanya segregasi antara orang Maluku beragama Islam dan Kristen (Ansori et al., 2014; Dandirwalu, 2016; Hasudungan, 2020) dan belum selesainya proses peacebuilding yang dilakukan.

Konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999-2003 merupakan konflik sipil bernuansa agama yang sangat besar baik dari sisi korban jiwa, waktu dan kerusakan fisik. Itu sebabnya dampaknya masih terasa hingga saat ini dan masih berpotensi untuk terjadi konflik lagi. Pada tahun 2011 konflik Ambon memang sempat akan kembali mencuat. Hal tersebut menurut Fauzi, sangat mungkin terjadi karena masyarakat masih dibesarkan dalam cerita parsial soal kebencian (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, 2014). Akan tetapi, ada hal yang menarik dan istimewa mengenai proses resolusi dan rekonsiliasi konflik Ambon yakni, pelibatan kearifan lokal *pela gandong* dalam kedua proses tersebut. Keberhasilan *pela gandong* dalam proses resolusi dan rekonsiliasi berlanjut pada tahap pendidikan perdamaian (*peace education*) (Amirrachman, 2012; Hasudungan, 2020b) dan *peacebuilding* saat ini. Bahwa perdamaian yang dibangun dengan cepat setelah perselisihan agama (Fitriyah, 2020).

Saat konflik Ambon selesai dalam arti secara formal melalui Perjanjian Malino II pada 12 Februari 2002 banyak pihak yang memperkirakan bahwa proses

rekonsiliasi akan memerlukan waktu yang relatif sangat lama mengingat intensitas dan korban konflik sangat besar. Akan tetapi, tesis tersebut terbantahkan dengan survei Kementerian Agama Republik Indonesia yang menetapkan provinsi Maluku sebagai satu diantara provinsi paling tinggi indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 (Sani, 2019) dan laboratorium perdamaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Banyak donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional juga meninggalkan Ambon menyusul tsunami di Aceh pada 2004 dan gempa bumi di Yogyakarta pada 2005, membuat lebih sulit bagi LSM lokal di Ambon untuk mengakses anggaran untuk pemulihan pasca kekerasan (*The Centre for Humanitarian Dialogue*, 2011). Karena, pemerintahan daerah tidak dapat beroperasi selama masa darurat, LSM internasional dan lokal berupaya mengisi kekosongan tersebut. LSM merupakan penyedia bantuan kemanusiaan, sanitasi, pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya terutama untuk pengungsi. Karena donor dan LSM internasional memiliki kesulitan memasuki daerah konflik, LSM lokal memainkan peran yang penting dalam penyaluran bantuan. Menyusul kerusuhan di bulan Januari 1999, LSM lokal di Ambon mendirikan sebuah konsorsium yang disebut Tim Relawan Kemanusiaan Sosial Maluku (TIRUS), yang beroperasi dari sebuah kantor LSM Katolik. Sebelum konflik, kira-kira ada sepuluh LSM di Ambon dan mereka sering melampaui perbedaan agama.

Namun, konflik membuat LSM terpecah secara agama, masing-masing menyediakan bantuan kepada komunitasnya masing-masing (*The Centre for Humanitarian Dialogue*, 2011). Menurut Brown pada periode sebelum perjanjian Malino ditandatangani,

LSM internasional dan badan-badan PBB fokus terutama kepada bantuan kemanusiaan dari pada kegiatan-kegiatan pembangunan perdamaian (*The Centre for Humanitarian Dialogue*, 2011). Mereka memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, serta mendanai LSM lokal dan menjalankan program-program pembangunan kapasitas untuk meningkatkan tata laksana pemerintahan lokal. Pencapaian penting lainnya di Maluku adalah kepemimpinan perempuan dalam mengorganisir pertemuan antar agama di antara pengungsi perempuan dan perdamaian (*The Centre for Humanitarian Dialogue*, 2011; Merkel, 2020) dan juga adanya provokator perdamaian yang didominasi anak-anak muda Maluku.

Keprihatinan yang sama akan keamanan dan masa depan anak-anak, pelayanan kesehatan makanan, dan kebutuhan pokok lainnya, pendidikan membantu menyatukan perempuan dari dua komunitas agama yang berbeda menjadi satu. Identitas bersama sebagai 'ibu' adalah pintu masuk untuk diskusi antar agama. Gerakan Perempuan Peduli (GPP) yang dibentuk pada September 1999 oleh lebih dari 40 aktivis perempuan Muslim, Protestan dan Katolik satu diantara bukti eksistensi dan peranan perempuan. Mereka mengorganisir aksi untuk menentang kekerasan di Maluku bahkan saat konflik mencapai puncaknya. Mereka juga mengatur pertemuan dengan pejabat pemerintah dan keamanan, pemimpin agama dan pemuda, juga melatih relawan perempuan di lapangan mengenai mediasi dan konseling. GPP juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan di Maluku.

Instruksi Presiden No. 6 (Inpres) merupakan inisiatif besar untuk pemulihan konflik oleh pemerintah pusat. Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 September 2003 dan bertujuan

untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku Utara (Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik, 2003). Anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan dan telah disetujui oleh DPR pada 14 September 2004 guna melaksanakan Inpres tersebut. Pada tahun 2005 ditambahkan anggaran sebesar Rp.250 milyar juga dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pembangunan pasca-konflik yang harus menjadi prioritas diantaranya, pemulihan kembali kepercayaan antarmasyarakat dan penanganan trauma. Kedua hal tersebut tidak mudah dan tidak dapat dilakukan secara instan (Ansori et al., 2014). Adanya *panas pela* pendidikan antara siswa Islam dan Kristen yang diprakarsai oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) bersama lembaga nasional dan lokal Maluku. Seperti Convey Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan *Ambon Reconciliation and Mediation Center* (ARMC) IAIN Ambon sebagai bentuk upaya pemulihan kembali kepercayaan antarmasyarakat dan penanganan trauma. Hal ini termasuk kategori dari pendekatan *Triple Nexus* dalam upaya membangun perdamaian (*peacebuilding*). Membangun perdamaian membutuhkan kolaborasi antar pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi konsep *Triple Nexus* (*Humanitarian, Development, Peace*)

dalam upaya membangun perdamaian (*peacebuilding*) setelah konflik Ambon-Maluku. Yakni, pertama, *Panas Pela* Pendidikan yang dilakukan antara SMPN 4 Salahutu Liang dan SMPN 9 Kota Ambon sebagai bentuk humanitarian konsep *Triple Nexus*. Kedua sekolah tersebut mewakili dua kelompok agama yang bertikai saat konflik dan bukti nyata adanya segregasi berdasarkan agama. Kedua, pada bagian *peace* (perdamaian) terdapat Dialog-Kerjasama Antar Pemuka Agama dan Aktivis Perdamaian dalam upaya membangun perdamaian. Pada tahap *development* (pembangunan) dari *Triple Nexus* dapat dilihat dengan terintegrasinya kearifan lokal *pela gandong* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ambon tahun 2011-2016.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif dan merupakan bagian dari laporan hasil penelitian tentang dinamika kontemporer perdamaian di Kota Ambon pasca konflik berakhir. Gall et al., (2007) menjelaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Oleh karena itu, alat observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif lebih holistik dan sering kali melibatkan kumpulan data yang kaya dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peserta individu, termasuk pendapat, perspektif, dan sikap mereka (Nassaji, 2015).

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, observasi dan analisis dokumen. Pengumpulan data-data lapangan dilakukan sepanjang bulan Januari 2018 dan dilanjutkan pada Juli hingga November 2019. Guru, murid,

kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aktivis perdamaian telah diwawancari dalam penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan dinalisis dengan menggunakan model deskriptif interaktif yang ditawarkan Miles & Huberman.

Berdasarkan analisis data Miles & Huberman di atas maka penelitian melalui tahapan sebagai berikut: (1) mencatat semua penemuan fenomena di lapangan baik dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; (2) meninjau catatan observasi, wawancara dan studi literatur, dan memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulangi untuk memeriksa kemungkinan kesalahan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data rahasia dengan memperhatikan arah dan tujuan penelitian; dan (4) melakukan analisis akhir berupa laporan penelitian.

PEMBAHASAN

Triple Nexus

Krisis kemanusiaan diakibatkan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat yang sudah menghadapi kerentanan. Karena skala krisis dan peningkatan konflik yang berlarut-larut, para pelaku kemanusiaan tidak dapat menangani kebutuhan orang-orang yang terkena dampak sendiri. Aktor kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi akar penyebab kerentanan sambil memenuhi kebutuhan kemanusiaan, mendukung ketahanan, dan membangun kapasitas jangka panjang dari populasi yang terkena dampak. Inilah yang dikenal sebagai *Triple Nexus* atau *humanitarian* (kemanusiaan), *development* (pembangunan), *peace* (perdamaian) *Nexus*.

Tujuan dari *Triple Nexus* adalah agar para pelaku kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian dapat

bekerja sama menuju serangkaian hasil yang serupa dalam proses perencanaan multi-tahun bila memungkinkan dan sesuai, dengan mendasarkan pendekatan ini pada keunggulan komparatif masing-masing aktor untuk membuat tanggapan kolektif mereka lebih koheren, efisien, dan efektif. Howe (2019) menjelaskan bahwa hubungan timbal balik yang kuat antara upaya kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian, konsep '*Triple Nexus*' menunjukkan bahwa tindakan di bidang-bidang ini dapat digabungkan dengan lebih baik untuk memiliki dampak yang lebih besar dan saling memperkuat. Mengingat tantangan pencapaian SDG di negara-negara yang terpengaruh konflik, potensi pendekatan ini semakin signifikan. *Triple Nexus* bertujuan untuk kolaborasi yang lebih baik antara pelaku kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian, dan koherensi di antara sektor-sektor ini untuk memiliki tanggapan yang lebih efektif, efisien, dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Barakat & Milton, 2020). Pengetahuan tentang konteks lokal merupakan aspek penting dalam memahami, menyelesaikan, dan mengubah konflik.

Triple Nexus yang juga disebut sebagai "Cara Baru untuk Bekerja," sebuah konsep kebijakan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara inisiatif kemanusiaan, pembangunan, dan pembangunan perdamaian. Tujuan menyeluruh dari "*Triple Nexus*" adalah, jika memungkinkan, untuk memfasilitasi kolaborasi, koordinasi, berbagi informasi, dan perencanaan dan analisis bersama antara praktisi yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, pembangunan, dan pembangunan perdamaian. Gagasan yang melandasi konsep ini adalah, seperti yang dinyatakan dalam satu laporan, bahwa para pelaku pembangunan perdamaian, pembangunan, dan kemanusiaan "semuanya memiliki tujuan luas yang sama, yaitu untuk berkontribusi

pada perlindungan dan kesejahteraan populasi yang terkena dampak dan untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap eksternal dan internal guncangan.

Diperlukan pendekatan khusus kontekstual dan berpusat pada orang untuk mengimplementasikan *Nexus*. Ini termasuk memahami kepercayaan dan praktik keagamaan orang-orang di samping para aktor lokal yang mereka tuju dalam krisis, seperti Konflik Ambon Maluku. Tercapainya perjanjian damai Malino II pada 12 Februari 2002 yang didukung oleh menteri-menteri dari Jakarta, Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono, perundingan perdamaian yang paling sukses terjadi. Malino II menghadirkan 35 perwakilan Muslim Maluku dan 35 perwakilan Kristen Maluku (termasuk tokoh agama dan adat, akademisi, dan rakyat kecil) dan petinggi pemerintahan nasional dan provinsi dari level paling atas, dan merupakan usaha pemerintah pertama yang berhasil, sedikitnya secara parsial. Melalui pertemuan ini, seratus orang menandatangani rencana dengan 11 poin (C. J Böhm, 2005). Latarbelakang adanya konsep *Triple Nexus* karena kebutuhan untuk penilaian ulang yang kritis terhadap konsep lokalisasi dalam respons konflik, baik dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif, mendorong pembangunan yang berakar secara lokal dalam konteks yang terpengaruh konflik, atau dalam mendorong perdamaian (Slim, 2017).

Sementara masing-masing dari ketiga domain ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam cara mereka menangani masalah skalar dari dinamika global-lokal, dengan munculnya pemikiran neksum dengan integrasi upaya kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian, atau Cara Kerja Baru PBB, ada kebutuhan akan pemikiran integratif dan holistik di seluruh dan

di luar ego sektoral. Identifikasi yang dilakukan oleh *Center on International Cooperation* adalah program berbasis wilayah di Nigeria, hubungan antara bantuan kemanusiaan dan pemerintahan lokal di Somalia, dan hubungan antara program perlindungan sosial dan bantuan kemanusiaan di Chad, Ethiopia, Irak, Yordania, dan Yaman (*Center on International Cooperation*, 2019). Salah satu temuan yang paling menggembirakan adalah bahwa hubungan pembangunan kemanusiaan-pembangunan perdamaian (*Humanitarian, Development, Peace*) tampaknya bergerak melampaui analisis dan perencanaan dan menjadi tindakan praktis dan terprogram dengan tujuan bersama.

Sejak adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa telah terlibat dalam diskusi ekstensif tentang cara paling efektif untuk mendukung negara-negara mencapai agenda ambisius ini pada tahun 2030. Salah satu proposal utamanya adalah untuk fokus pada pembangunan kemanusiaan-perdamaian nexus.

Tren ini berarti bahwa pencegahan konflik lebih diperlukan dari sebelumnya. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) mewujudkan diktum lama bahwa “tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan”. Agenda tersebut, antara lain, mengakui kebutuhan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan *Sustainable Development Goals 2016 (United Nations Economic and Social Council, 2016)*. Kontekstual seperti kerangka hukum, kebutuhan orang yang menjadi perhatian, karakteristik geografis suatu

daerah, dan ada atau tidaknya kekerasan merupakan hal yang sangat penting untuk konseptualisasi dan implementasi konfigurasi Nexus (Weishaupt, 2020).

Triple Nexus dapat berhasil hanya jika hubungan pembangunan perdamaian-pembangunan-kemanusiaan tidak mengarah pada persepsi, atau kenyataan, bahwa aksi kemanusiaan telah dimasukkan dalam agenda politik (Tronc et al., 2019). Dengan kata lain, kepentingan politik para pemangku kepentingan, keterlibatan aktor lokal dan kehadiran konflik dan kekerasan merupakan penentu kontekstual untuk konfigurasi Nexus (Howe, 2019). Dimulai dengan penilaian yang cermat terhadap hal tersebut, dan kekhususan kontekstual lainnya, dapat ditentukan jika, dan bagaimana, hubungan Humanitarian-Development-Peace harus diterapkan dalam situasi tertentu.

Implementasi *Triple Nexus* Pasca Konflik Ambon

Panas pela pendidikan

Panas pela pendidikan adalah bentuk baru kearifan lokal *pela gandong* dalam bidang pendidikan untuk memperluas keberhasilan *pela gandong* dalam proses rekonsiliasi konflik. *Panas pela pendidikan* memiliki arti mempererat kembali hubungan persaudaraan yang sebelumnya telah dibangun oleh para leluhur dengan cara mengadakan upacara secara berkala dan melibatkan seluruh warga sekolah. Sedangkan *pela gandong* adalah kearifan lokal milik masyarakat Maluku yang terdiri kata *pela* dan *gandong*. Iwamony (2019) mengungkapkan *pela gandong* telah sejak lama berhasil membuka ruang bagi orang Maluku baik penganut agama Islam dan agama Kristen untuk hidup sebagai orang bersaudara, tanpa mengingkari kekhasan imannya. *Pela* adalah hubungan

kekerabatan dan persaudaraan antar dua desa atau lebih yang berlainan agama) dan *gandong* (kandung). Jadi *pela gandong* adalah ikatan persaudaraan dengan saling mengangkat saudara satu sama lain. Keunggulan budaya *pela* dan *gandong* di Maluku dilihat bukan pada porsi wilayah administrasi semata namun makna esensi dari *pela gandong* itu sendiri.

Panas pela pendidikan dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan juga di SMPN 9 Kota Ambon dengan SMPN 4 Salahutu Liang sehingga mampu menjadi media desegregasi antara siswa yang beragama Islam dan Kristen (Hasudungan, 2020a). Mewakili kelompok agama Kristen yakni, UKIM dan SMPN 9 Kota Ambon. Sedangkan mewakili kelompok agama Islam yakni, IAIN Ambon dan SMPN 4 Salahutu Liang. Hal tersebut, menurut Said, antara lain ditandai dengan, suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan tingkat nasional di Kota Ambon Provinsi Maluku, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional tahun 2012, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional tahun 2015, dan Tanwir Muhammadiyah tahun 2017, yang didukung penuh oleh semua komunitas umat beragama di Maluku.

Sementara di kelompok Islam terus dikampanyekan konsep tentang multikulturalisme, sebagai wacana sosial untuk mengekspresikan semangat persaudaraan. Multikulturalisme menjadi visi utama dan tema pokok yang membingkai keseluruhan aktifitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Multikulturalisme diintegrasikan dalam kurikulum akademik semua program studi, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan akademik lainnya. Hal tersebut diwujudkan

dengan sejumlah mahasiswa dari Jurusan Sosiologi Agama IAIN Ambon untuk melakukan magang profesi di Gereja Protestan Maluku (GPM) pada tahun 2015 (Ernas, 2016). Tujuannya adalah membangun pengertian dan pengetahuan mahasiswa terhadap keragaman dan perbedaan.

Kerjasama antar pemuka agama dan aktivis perdamaian

Pada bagian *peace* (perdamaian) terdapat Dialog-Kerjasama Antar Pemuka Agama dan Aktivis Perdamaian dalam upaya membangun perdamaian. Lee (2021) mencatat terdapat sejumlah besar inisiatif untuk rekonsiliasi sosial yang telah dimobilisasi oleh aktor masyarakat sipil (*civil society*) seperti *the Documentary Center of Cambodia, the International Center for Conciliation, Trans-cultural Psychological Organization, and Youth for Peace*. Bidang rekonsiliasi yang mereka cakup meliputi pencarian kebenaran, edukasi publik tentang sejarah Khmer Merah, penyembuhan psikologis, dan dialog antarkelompok. Kekuatan *civil society* yang tumbuh subur pasca konflik, juga tampak sebagai kekuatan yang mengkampanyekan model aktif kerukunan, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah teolog dan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Antar Iman untuk Kemausiaan Maluku (eIAleM). Lembaga tersebut diinisiasi secara tertutup sejak tahun 2000 disebabkan karena eskalasi konflik bernuansa agama masih cukup tegang. Ada tiga orang yang berinisiatif pembentukan lembaga eI Al eM yaitu Jacky Manuputty (Kristen), Sven Loupatty (LSM), dan Zakiyah Salam (Islam) (Ismail, 2006). Sejak 2005 sejumlah penggiat lembaga tersebut memfokuskan diri pada konsolidasi dialog publik terkait berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan teologis keagamaan. Mengadakan dialog publik untuk membangun saling persepsi atas beberapa

isu kekinian yang bergulir dalam wacana publik sehari-hari di kota Ambon, seperti HIV / AIDS, korupsi dan pengelolaan sampah. Selain itu, dilakukan pula berbagai pertemuan lintas agama yang terbatas, untuk mengkaji dan memetakan perkembangan situasi keamanan dari waktu ke waktu. Aktivis El-AI-EM, Wakano Abidin mengatakan upaya membangun dialog merupakan salah satu cara menumbuhkan karakter, toleran dan kehidupan beragama di Ambon sebagai bagian dari kerukunan yang aktif (Ernas, 2018). Konteks relasi umat Islam dan Kristen di Maluku, otentiknya sebuah dialog justru tidak berhenti pada upaya saling memahami, tetapi lebih daripada itu, dialog yang otentik harus mendukung upaya rekonsiliasi dan mendorong umat beragama untuk semakin mengenal keunikan iman (Parihala & Saptanno, 2020).

Selain itu, aktivitas para musisi yang mengkolaborasikan musik hadroh dari masyarakat Muslim dengan musik trompet dari masyarakat Kristen di Kota Ambon berperan dalam melestarikan perdamaian antar umat beragama pasca konflik Ambon-Maluku (Lestari, 2020). Para musisi yang berbeda agama tetapi telah memberikan suatu corak baru dalam merawat perdamaian di Maluku.

Golongan menengah terdidik dan kebanyakan elit politik di Jakarta berpendapat bahwa konflik Ambon merupakan konflik politik. Tepatnya konspirasi elite politik yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan atau merusak proses demokratisasi yang tengah berlangsung (Rudiansyah, 2016). Oleh karena itu, perkembangan politik dewasa ini yang telah memanfaatkan politik identitas, populisme, ujaran kebencian (*hate speech*) dalam meraih kekuasaan telah menjadi tantangan selanjutnya bagi perdamaian Indonesia dan Ambon-Maluku khususnya. Dampak

pemilihan presiden republik Indonesia tahun 2014 dan 2019 serta pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 telah membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok (segregasi, polarisasi) hingga saat ini.

***Pela gandong* terintegrasi dalam RPJMD Kota Ambon**

Pada tahap *development* (pembangunan) dari *Triple Nexus* dapat dilihat dengan terintegrasinya kearifan lokal *pela gandong* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ambon tahun 2011-2016. Perlu diketahui dalam RPJMD Kota Ambon sudah terdokumentasi dengan baik, jelas serta memuat bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kearifan lokal *pela gandong* dibidang pendidikan (Pemerintah Kota Ambon, 2013). Hakikat dari pengarusutamaan pendidikan perdamaian mulai level bawah hingga level pengambil kebijakan turut serta (Hasudungan et al., 2020). Semuanya tersistematis dan terprogram dengan dukungan penuh semua *stakeholder*.

Dokumen RPJMD kota Ambon memuat tentang: Permasalahan Pembangunan terdapat dua topik yang berhubungan langsung dengan pendidikan perdamaian pasca konflik Ambon Maluku tahun 1999 yakni; peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku khususnya di Ambon yang berlangsung kurang lebih empat tahun telah merubah tatanan kehidupan dan persaudaraan orang tetangga dan bersaudara di Maluku yang sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu selalu hidup damai dan aman, saling menghormati dan menghargai. Colombijn (2018) menjelaskan sebelum kekerasan agama meletus, pembagian spasial di Kota Ambon terdiri dari berbagai lapisan dan penduduknya memiliki identitas

sosial spasial yang beragam. Satu lapisan adalah mosaik halus dari lingkungan Muslim dan Kristen, yang tidak pernah sepenuhnya mono-religius.

Akibat konflik saat ini di kota Ambon kehidupan masyarakat tersegregasi berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing, yang patut diduga sebagai bom waktu bagi generasi yang akan datang. Berbagai permasalahan mendasar yang muncul dalam implementasi bidang ini adalah sering terjadi konflik horizontal antara komunitas yang berbeda agama konflik yang berkepanjangan pada waktu yang lalu meninggalkan berbagai masalah hukum terkait dengan hak-hak warga masyarakat atas tanah dan hak milik lainnya pada wilayah-wilayah tertentu yang pernah dihuni oleh kedua komunitas yang berbeda agama seperti; penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang saat ini telah merambah pada berbagai kalangan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah pada tingkat menengah pertama, Segregasi masyarakat kota Ambon berdasarkan aliran kepercayaan/agama, peningkatan kehidupan *orang basudara* dan kearifan lokal.

Strategi pembangunan kota Ambon yang didasarkan hasil analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KKPA/SWOT) lingkungan internal dan eksternal yang bersentuhan dengan pendidikan perdamaian berbasis *pela gandong*. Maka diperoleh pilihan strategi pembangunan kota berikut ini, yakni, meningkatkan kehidupan *orang basudara* berbasis kearifan lokal. Strategi ini diarahkan pada terciptanya kondisi kehidupan kondusif di masyarakat, mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mengembangkan kebudayaan lokal yang mampu mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan penduduk kota, pengelolaan kekayaan

dan peningkatan pemahaman kehidupan dalam keragaman serta pengembangan nilai budaya lokal pengikat hubungan *orang basudara*, serta revitalisasi dan pengembangan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual.

Visi Kota Ambon 2011-2016 yaitu "Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat", maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan kota Ambon. Peneliti menyajikan misi 4 (empat) dan 7 (tujuh) yang berkaitan langsung dengan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal *pela gandong* sebagai berikut: Misi ke-4, Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan dan kesehatan. Kabasubabo & Van Sluijs (2018) menunjukkan pada elemen kunci yaitu, inklusi, hal penting untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian di negara-negara yang rapuh dan terpengaruh oleh konflik. Pendidikan dan kesehatan yang inklusi merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan. Yaitu gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Misi ke-7, meningkatkan kehidupan *orang basudara* berbasis kearifan lokal Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk Ambon yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis.

Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar *orang basudara* dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik masa lalu tersebut.

SIMPULAN

Perdamaian adalah keniscayaan. Mewujudkan perdamaian bukan saja tanggungjawab pemerintah, aktivis perdamaian ataupun tokoh agama/masyarakat melainkan tugas bersama baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerjasama dibutuhkan dari setiap *stakeholder* untuk mewujudkan perdamaian. Konsep *Triple Nexus* memberikan cara kerja baru dalam upaya membangun perdamaian (*peacebuilding*). Para *stakeholder* kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian dapat bekerja sama, kolaborasi, koordinasi, berbagi informasi, dan perencanaan dan analisis bersama dengan keunggulan komparatif masing-masing untuk membuat tanggapan kolektif yang lebih koheren, efisien, dan efektif.

Implementasi konsep *Triple Nexus* dalam upaya membangun perdamaian terwujud dengan adanya

panas pela pendidikan sebagai wujud dari *humanitarian*, kearifan lokal *pela gandong* terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ambon sebagai *development*. Serta Dialog-Kerjasama Antar Pemuka Agama dan Aktivis Perdamaian yang tergabung dalam lembaga Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan Maluku (eIAleM) serta provokator perdamaian sebagai *peace*. Hasilnya, provinsi Maluku sebagai satu diantara provinsi paling tinggi indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 dan laboratorium perdamaian-tempat bagi banyak orang untuk belajar mengenai konflik berdarah pada masa lalu dan perdamaian itu sendiri. Tantangan kedepannya adalah menguatnya politik identitas dan populisme yang dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraih kekuasaan tanpa menghiraukan dampak negatif yakni, terpolarisasi dan rusaknya harmonisasi kehidupan di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian hingga hasil studi tersebut menjadi artikel. Penghargaan dan ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada Redaktur dan Tim Jurnal Harmoni serta para reviewer yang telah berkenan memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan artikel ini.

DAFTAR ACUAN

- Amirrachman, A. (2012). *Peace education in the Moluccas, Indonesia: between global models and local interests*. Universiteit van Amsterdam. <https://dare.uva.nl/document/2/145859>
- Ansori, M. H., Sukandar, R., Peranto, S., Karib, F., Cholid, S., & Rasyid, I. (2014). *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. www.habibiecenter.or.id
- Barakat, S., & Milton, S. (2020). Localisation Across the Humanitarian-Development-Peace Nexus. *Journal of Peacebuilding & Development*, 15(2), 147–163. <https://doi.org/10.1177/1542316620922805>
- C. J Böhm. (2005). *Brief Chronicle of the Unrest in the Moluccas, 1999–2005*. <https://www.oocities.org/ambon67/noframe/diocese0510y2k.htm>
- Center on International Cooperation. (2019). *The Triple Nexus in Practice: Toward a New Way of Working in Protracted and Repeated Crises*. New York University. <https://cic.nyu.edu/sites/default/files/triple-nexus-in-practice-nwow-full-december-2019-web.pdf>
- Colombijn, F. (2018). The Production of Urban Space by Violence and its Aftermath in Jakarta and Kota Ambon, Indonesia. *Ethnos*, 83(1), 58–79. <https://doi.org/10.1080/00141844.2016.1138983>
- Dandirwalu, R. (2016). Totem Ambon Manise : Membongkar Segregasi Teritorial Berbasis Agama di Kota Ambon. *Antropologi Indonesia*, 35(1), 30–44. <https://doi.org/10.7454/ai.v35i1.5511>
- Ernas, S. (2016). Architecture of Peace in Ambon: Reading Dynamics of Peace After Ten Years of Conflict. *Al-Albab*, 5(2), 219. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v5i2.504>
- Ernas, S. (2018). Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran dari Ambon-Maluku. *International Journal of Islamic Thought*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.009>
- Fitriyah, L. (2020). *Crescent of Peace: Muslim Peacebuilders in Ambon, Indonesia*. Rutgers University. https://sas.n.rutgers.edu/news-events/events/crescent-peace-muslim-peacebuilders-ambon-indonesia?fbclid=IwAR2OaL_YC4uC4vmNK3VNwu4eaFdxQVCIYc4KuKyA0dlUt3ZVzNb9X3ku-l4
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. (2007). *Educational research: an introduction* (8th ed, bl 712). Pearson.
- Hasudungan, A. N. (2020a). Panas Pela of Education : Desegregation of Muslim and Christian post-reconciliation at SMPN 4 Salahutu Liang and SMPN 9 Ambon. *Simulacra*, 3(2), 223–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/sml.v3i2.7854.g5051>
- Hasudungan, A. N. (2020b). Peace Education Based on Local Wisdom of Pela Gandong in Social Science. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.33019/berumpun.v3i2.36>

- Hasudungan, A. N., Sariyatun, S., & Joebagio, H. (2020). Pengarusutamaan Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon di Sekolah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2), 409. <https://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.664>
- Howe, P. (2019). The triple nexus: A potential approach to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals? *World Development*, 124, 104629. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104629>
- Ismail, A. (2006). EL AI EM DI MALUKU (Mengelola Kerukunan dari Akar Rumput). *Al-Qalam*, 12(2), 41–64. <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/559/405>
- Iwamony, R. (2019). From Exclusivism to Pluralism: Shifting Perspective of the Gereja Protestan Maluku (GPM) in Interreligious Relations. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 4(2), 117–131. <https://doi.org/10.15575/jw.v4i2.4829>
- Kabasubabo, M. M., & Van Sluijs, P. (2018). Dialogue Partnership for Prevention: The International Dialogue in context of the 2030 Agenda, Sustaining Peace and Conflict Prevention Agendas. *Journal of Peacebuilding & Development*, 13(2), 122–126. <https://doi.org/10.1080/15423166.2018.1467785>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Pela dan Gandong : Memetik Makna di Balik Dialog Budaya Daerah Maluku 2017*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbmaluku/pela-dan-gandong-memetik-makna-di-balik-dialog-budaya-daerah-maluku-2017/>
- Lee, S. (2021). Understanding Everyday Peace in Cambodia: Plurality, Subtlety, and Connectivity. *Journal of Peacebuilding & Development*, 16(1), 24–38. <https://doi.org/10.1177/1542316620974371>
- Lestari, D. T. (2020). Merawat Harmoni Agama melalui Kolaborasi Musik Hadroh dan Trompet di Ambon. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 4(3), 215–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.8880>
- Merkel, A. (2020). Merkel Tekankan Pentingnya Melibatkan Perempuan dalam Proses Perdamaian. <https://www.dw.com/id/agama-bisa-berkontribusi-banyak-bagi-perdamaian/a-55556440?fbclid=IwAR3uYFp3uYA-H79nIW4vmYLjtb9wbnIWx5gw1rByyLUOM9lf-BIs-N9QTY>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, 2nd edition* (2nd ed). Sage Publications.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Nuridin, E. (2018). Persahabatan Pendeta dan Ustad Mengantar Mantan Tentara Anak Ambon Menjadi Duta Damai. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43521909>
- Parihalala, Y., & Saptanno, K. (2020). Dari Kesaksian Iman ke Simbiosis Agama: Meninjau Konsep Dialog Calvin E. Shenk Bagi Perjumpaan Islam-Kristen di Maluku. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 4(2), 103–114. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8250>

- Pemerintah Kota Ambon. (2013). RPJMD 2011-2016. <https://ambon.go.id/rpjmd-2011-2016/>
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. (2014). Kisah Inspiratif di Balik Rekonsiliasi Konflik Ambon. <https://pgi.or.id/kisah-inspiratif-di-balik-rekonsiliasi-konflik-ambon/>
- Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik, Pub. L. No.6 Tahun 2003, 11 (2003). <https://www.bphn.go.id/data/documents/03ip006.pdf>
- Rudiansyah, D. (2016). Dimensi Sosio-Politik Konflik Ambon. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 161. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1143>
- Sani, A. F. I. (2019). Survei Kemenag: Indeks Kerukunan Aceh dan DKI di Bawah Rata-rata. tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1282682/survei-kemenag-indeks-kerukunan-aceh-dan-dki-di-bawah-rata-rata/full&view=ok>
- Slim, H. (2017). Nexus thinking in humanitarian policy: How does everything fit together on the ground? <https://www.icrc.org/en/document/nexus-thinking-humanitarian-policy-how-does-everything-fit-together-ground>
- The Centre for Humanitarian Dialogue. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. In Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue. <https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/64BahasaIndonesiaversion-June-2011.pdf>
- Tronc, E., Grace, R., & Nahikian, A. (2019). *Realities and Myths of the “Triple Nexus” Local Perspectives on Peacebuilding, Development, and Humanitarian Action in Mali*. In Harvard Humanitarian Initiative (Number June). https://hhi.harvard.edu/sites/default/files/publications/haf_-_mali.pdf
- United Nations Economic and Social Council. (2016). Enhancing the humanitarian-development-peace nexus. United Nations. <https://www.un.org/ecosoc/en/node/14973644>
- Weishaupt, S. (2020). *The Humanitarian-Development-Peace Nexus : Towards Differentiated Configurations* (Prepared for the UNRISD project on Integrated Solutions to Protracted Displacement – A Humanitarian/Development/Peace Nexus Approach, Number September). [https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/\(httpAuxPages\)/384F8172D81CA0B2802585DC003903AB/\\$file/WP2020-8---Weishaupt.pdf](https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/384F8172D81CA0B2802585DC003903AB/$file/WP2020-8---Weishaupt.pdf)